

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN (*NON E- CATALOG*) ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANAH DATAR DENGAN PT RAJAWALI NUSINDO**

Ehsty Ahnura Z. 1210112058. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK II (Hukum Perdata
Bisnis). Halaman, 84 Tahun 2016.

ABSTRAK

Pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah proses untuk menyediakan kebutuhan obat di Unit Pelayanan Kesehatan. Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kefarmasian dan kebutuhan pokok masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa yaitu upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode tertentu agar dapat dicapai kesepakatan dengan pihak penyedia barang/jasa. Agar pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan baik maka pihak pengguna dan penyedia harus berpatokan kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (*non e-catalog*) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dengan PT Rajawali Nusindo ? b) Apa saja kendala yang ditemui selama proses pelaksanaan perjanjian pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (*non e-catalog*) antara Dinas Kesehatan Tanah Datar dengan PT Rajawali Nusindo tersebut ? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi dilapangan. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder yang diolah berdasarkan hasil kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kabupaten Tanah Datar dan PT Rajawali Nusindo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (*non e-catalog*) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta perubahan-perubahannya.